

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W20-A2/13.a/OT.01.1/I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Hj. AISYAH ISMAIL, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 2 Januari 2020

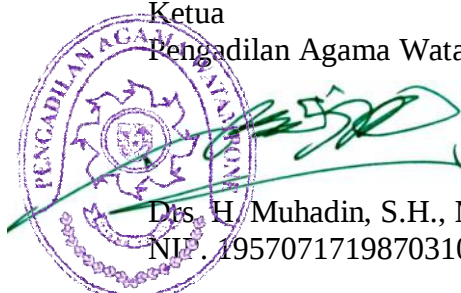
Pihak Kedua

Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Makassar,


Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.
NIP. 19531110 197602 2 003

Pihak Pertama

Ketua
Pengadilan Agama Watampone


Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 195707171987031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W20-A2/13.a/OT.01.1/I/2020
Pengadilan Agama Watampone

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100 %

		Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	13.840.709.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	195.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	154.660.000

Bone, 2 Januari 2020

Ketua,



Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H.

NIP. 195707171987031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W20-A2/14.a/OT.01.1/I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KAMALUDDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Watampone

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 2 Januari 2020

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H.

NIP. 195707171987031005

Pihak Pertama

Panitera Pengadilan Agama Watampone



H. KAMALUDDIN S.H., M.H.

NIP. 196411071987031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W20-A2/14.a/OT.01.1/I/2020
Pengadilan Agama Watampone

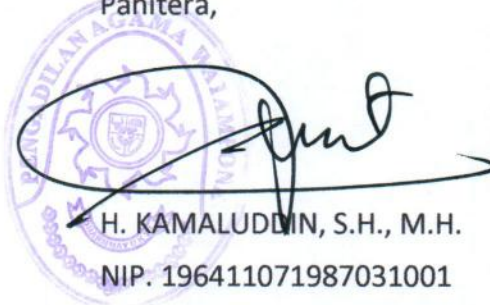
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100 %

		Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	13.840.709.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	195.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	154.660.000

Bone, 2 Januari 2020

Panitera,



H. KAMALUDDIN, S.H., M.H.

NIP. 196411071987031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W20-A2/15.a/OT.01.1/I/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI, S.E., M.SI.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Watampone

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bone, 2 Januari 2020

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. MUHADIN, S.H., M.H.

NIP. 195707171987031005

Pihak Pertama

Sekretaris Pengadilan Agama Watampone



H. ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI, S.E., M.SI.

NIP. 197412142006041002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W20-A2/15.a/OT.01.1/I/2020
Pengadilan Agama Watampone

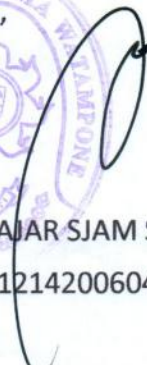
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	91 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99 %
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100 %

		Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100 %

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	13.840.709.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	195.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	154.660.000

Bone, 2 Januari 2020

Sekretaris,



H. ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI, S.E., M.SI.

NIP. 197412142006041002